**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Konsep Pembinaan Anak Jalanan**
3. **Pengertian Pembinaan**

Istilah pembinaan bukanlah merupakan sesuatu yang baru didengar atau diketahui, secara umum pembinaan sering diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun oleh Suharto (2010: 57) secara konseptual, pembinaan diartikan sebagai:

Pemberkuasaan *(empowerment),* berasal dari kata *’power’* (kekuasaan atau keberdayaan), karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka

Sehubungan dengan itu, proses pembinaan dikaitkan dengan proses pemberdayaan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang tidak berdaya sehingga mampu untuk mempengaruhi kehidupannya agar menjadi lebih baik.

Terkait dari pengertian di atas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:152) ”Pembinaan berasal dari kata bina yang diartikan sebagai proses/usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.

Pendapat terkait dengan pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas juga dikemukakan oleh Poerwadarmita (Asriani, 2002: 7) yang menyatakan bahwa “Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.

Dalam dua pengertian di atas dapat diketahui bahwasanya pembinaan selalu merujuk pada proses atau usaha yang dimana proses tersebut dimplikasikan di dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberdayaan seseorang dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dinyatakan bahwa:

Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

Dari pernyataan Perda No. 2 Tahun 2008 tersebut di atas, Pembinaaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi salah satu masalah sosial yang terjadi di Kota Makassar yaitu anak jalanan yang dimana sasarannya tidak hanya sumber masalah sosial tersebut yaitu anak jalanan namun juga keluarga dari anak jalanan tersebut.

Selanjutnya pengertian dikemukakan oleh Widjaja (Fitmayani, 2010: 9), yang menekankan pembinaan pada aspek manajemen bahwasanya pembinaan adalah:

Segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin.

Dari pernyataan Widjaja tersebut di atas, pengertian pembinaan dikaitkan dengan fungsi dari manajemen, yang dimana memiliki arti bahwasanya pembinaan harus memiliki manajemen yang baik sehingga proses atau usaha yang dimuat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Pendapat para ahli yang lain yaitu Munandar (Mardiana, 2009: 8) mengartikan pembinaan adalah:

Pada hakekatnya merupakan upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang ditujukan bagi terciptanya manusia yang terampil, cakap dan terpupuk sikap mental yang positif dimana pengembangan diselaraskan dengan nilai yang dianut

Pengertian pembinaan di atas kemudian menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan *(freedom)*, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Selanjutnya dari pendapat para ahli yaitu Hidayat S (1979: 10) mendefinisikan pembinaan adalah:

Suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pembinaan merupakan usaha pelatihan yang bertujuan untuk menuntun dan mengarahkan perkembangan dari peserta pelatihan dalam hal ini anak didik melalui pengetahuan, keahlian dan sikap yang diperoleh untuk memenuhi standar atau tujuan tertentu.

Soetopo (1991:43) dalam studinya mendefinisikan “Pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”. Sehingga pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh kesimpulan mengenai pembinaan, yaitu merupakan proses atau usaha meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan/ *skills* seseorang sehingga pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan ada usaha untuk menata ulang kembali pola kehidupan sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

1. **Pengertian Anak Jalanan**

Bambang (Astutik, 2004:14) mengemukakan, Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat Selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos De Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.

Namun di tempat lainnya istilah anak jalanan berbeda-beda. Di Colombia mereka disebut “*gamin”(urchin* atau melarat) dan “*chinches”* (kutu kasur), “*margianis”* (krimininal atau marginal) di Rio “*pa’jaros frutero* (burung pemakan buah) di Peru, “*proreras* (ngrengat) di Bolivia, “*resistoleros”* (perampok kecil) di Honduras, “*Bui Doi”* (anak dekil) di Vietnam, “*saligoman”*(anak yang menjijikan di Rwanda, atau *“poussing”* (anak ayam), “*moustique”* (nyamuk) di Camerron and *“balados”* (pengembara) di Zaire dan Congo.

Istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat. Semua anak sebenarnya memiliki hak penghidupan yang layak tidak terkecuali anak jalanan. Namun demikian ternyata realita berbicara lain, mayoritas dan dapat dikatakan semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan.

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, PBB (2004) menjelaskan bahwa anak jalanan adalah “individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain”.

Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan buruk di jalanan khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi objek seksual seperti sodomi atau pelacuran anak sehingga anak jalanan yang semulanya hakikat mereka sebagai anak menjadi hilang keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial dianggap sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan *(shocks and stresses).*

Murniatun (2004: 9) menyatakan bahwa anak jalanan adalah:

Anak usia antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya.

Dari pengertian di atas diperoleh kesimpulan bahwa anak yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun yang bekerja di jalanan dianggap sebagai anak jalanan yang hanya menganggu ketentraman dan keselamatan orang lain. Anak ini kemudian tidak hanya dapat menggangu ketentraman dan keselamatan pengguna jalan namun juga membahayakan dirinya sendiri sebagai anak yang kodratnya bukan di jalan namun di tempat-tempat yang layak seperti rumah atau sekolah.

Selanjutnya Putranto dalam studi kualitatifnya (Astutik, 2004) mendefinisikan anak jalanan “sebagai anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa anak yang berusia 6 sampai dengan 15 tahun yang bekerja seharian penuh di jalanan dan kemudian tidak bersekolah dan tidak tinggal dengan orang tuanya disebut sebagai anak jalanan karena dipandang selalu berada di jalanan untuk bekerja demi memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Selain itu Yasen (Salim, 2009: 12) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya di Makassar menyatakan bahwa anak jalanan adalah:

Anak yang berumur di bawah 21 (dua puluh satu) yang setiap harinya menghabiskan waktunya minimal 4 jam dan maksimal 13 jam di jalanan, perempatan lampu merah atau tempat-tempat umum untuk mencari penyambung hidup dengan cara mengemis, mengamen, atau menawarkan jasa lainnya

Pernyataan tersebut di atas kemudian didukung dengan Moeliono (Nur’Aini, 2009: 4), yang menyatakan bahwa “Anak jalanan secara operasional dapat dilihat dari anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan lebih dari empat jam waktunya di jalanan baik untuk bekerja maupun kegiatan lainnya”.

Anak yang menghabiskan waktunya di jalan minimal 3 jam sampai dengan maksimal 4 jam sehari bukanlah anak yang memiliki keberfungsian sosialnya dengan baik, dan hal ini juga seharusnya mendapat perhatian besar dari semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat karena anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan rentan dengan resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, atau tertular kebiasaan yang tidak sehat dari kultur jalanan.

Departemen Sosial Republik Indonesia (2004), kemudian juga memaparkan bahwa “anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai dengan 18 tahun”.

Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya mempunyai ciri-ciri penampilan yang kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus sehingga mengakibatkan mobilitas yang tinggi.

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, Mulandar (Suyanto, 2013:212) juga mengemukakan “Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas anak jalanan bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak. Terlebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat, menjadi sasaran eksploitasi dan bentuk penindasan lainnya, sehingga kodrat mereka sebagai anak juga ikut terabaikan.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dituliskan sebelumnya bahwa anak jalanan didefinisikan berdasarkan usia mereka, namun menurut Moeliono (Nur’Aini, 2009) di dalam penelitian dan penanganan anak jalanan di beberapa kota besar menunjukkan ada dua kategori/ tipe anak jalanan yaitu: (*1) children of the street* dan (*2) children on the street also called working children.*

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. *Children of the street,* tipe ini adalah anak yang hidup dan tinggal di jalanan, tidak berhubungan lagi dengan keluarganya dan di lingkungan anak-anak jalanan biasanya disebut gelandangan, gembel, dan sebagainya. Mereka biasanya tidak mempunyai tempat tinggal maupun pekerjaan yang tetap sehingga banyak di antara mereka terlibat dalam pencurian, kriminalitas dan penggunaan NARKOBA (Narkotik, Alkohol, Obat dan Bahan Adiktif).
2. *Children on the street also called working children*. Di Indonesia jenis anak ini disebut pekerja anak di jalan yakni anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalan atau tempat-tempat umum untuk membantu keluarganya. Pada umumnya mereka bekerja untuk memperoleh pendapatan sehingga biasanya mereka relatif tidak banyak menggunakan waktu luang untuk hal lain seperti penggunaan NARKOBA.

Dan kemudian UNICEF (2004), juga mengkategorikan anak jalanan ke dalam tiga kelompok yaitu: (*1) children at risk, (2) children on the street, dan (3) children of the street.* Yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. *Children at risk,* didefinisikan sebagai anak malang dengan faktor resiko tertentu seperti kemiskinan dan putus sekolah yang dapat memicu mereka untuk pergi dari rumah dan menghabiskan sebagian hidup mereka di jalan.
2. *Children on the street,* yaitu anak yang bekerja di jalan sepanjang hari dan kembali ke rumah pada malam hari. Pekerjaan mereka sebagai tenaga kasar seperti menyemir, menjual permen dan barang lain, mencuci dan menjaga mobil atau membawa barang.
3. *Children of the street*, yaitu anak yang memiliki kontak yang sangat minimal dengan keluarga serta hidup dan tidur di jalan dengan teman atau yang lebih dewasa.

Kemudian ditegaskan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen bahwa pengertian anak jalanan adalah “Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari”.

Sesuai pada Peraturan daerah no. 2 tahun 2008 kemudian dijelaskan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan kepada anak jalanan, namun juga kepada gelandangan, pengemis dan pengamen. Dan kemudian dijelaskan bahwa gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sedangkan pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain, dan pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.

Dari apa yang dijelaskan mengenai gelandangan, pengemis dan pengamen dapat diketahui mereka dapat disebut sebagai anak jalanan ketika usia mereka berada pada 5-18 tahun, namun fokus pada penelitian ini adalah anak jalanan, sehingga yang menjadi kajian utama adalah anak jalanan secara umum.

Dari kajian pustaka yang telah dikemukan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan sendiri bukanlah kelompok yang homogen, mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya.

1. **Karakteristik Anak Jalanan**

Anak jalanan dalam Departemen Sosial Republik Indonesia (2004) adalah sebutan bagi anak yang sering melakukan aktivitas di jalanan, dan dalam kehidupannya anak jalanan ini juga tidak terlepas dari stigma negatif, suka membuat keributan, menyebabkan kemacetan hingga gemar melakukan tindakan-tindakan kriminal adalah justifikasi yang sering dialamatkan kepada mereka. Seperti yang dilansir bahwa sebagian besar anak jalanan mengisi waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, *mall*, terminal bis, stasiun kereta api dan bahkan taman kota. Jalanan bukanlah tempat yang pantas bagi mereka, mereka seharusnya hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah yang hangat dan bersahabat. Mereka juga selayaknya bermain dan belajar di sekolah atau di tempat-tempat yang memang pantas untuk itu. Jalanan memiliki resiko-resiko yang sangat berbahaya bagi anak. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh.

Pada umumnya anak jalanan tidak hidup bersama keluarganya, tidak bersekolah, dan tidak memiliki orang dewasa atau lembaga yang merawat mereka. Kemiskinan diyakini sebagai faktor utama menimbulkan fenomena anak jalanan. Keluarga yang miskin cenderung menyuruh anak mereka bekerja, selain itu, tidak sedikit anak-anak yang menjadi anak jalanan karena keluarga tidak harmonis, ditelantarkan oleh keluarganya, atau bahkan karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Riptek, Vol. 1, Vol. 2 (2008) menyatakan dalam hasil penelitian tentang studi karakteristik anak jalanan bahwa karakteristik anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan
2. Sebagian besar beragama muslim dan sebagian kecil non muslim
3. Usia rata-rata 13 tahun, termuda 6 tahun dan tertua 21 tahun
4. Sebagian besar berasal dari kotanya sendiri dan sebagian kecil berasal dari luar kota
5. Rata-rata berada di jalanan 6 jam sehari
6. Sebagian besar ke jalanan setiap hari dan sebagian lagi tidak setiap hari
7. Profesi yang dijalani sebagian besar sebagai pengamen, peminta-minta, tukang parkir dan membersihkan mobil

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa karakteristik anak jalanan merupakan fenomena sosial yang hingga saat ini terus mencemaskan. Meskipun anak jalanan ditemukan di beberapa negara maju, mereka lebih banyak berada di jalanan kota-kota negara berkembang. Secara global, diperkirakan ada sekitar 100 juta anak jalanan di seantero dunia. Sebagian besar anak jalanan adalah remaja berusia belasan tahun. Tetapi tidak sedikit yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas, sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan sex.

Kepedulian terhadap anak jalanan terutama didasari kenyataan bahwa anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, hidup di jalanan sangat membahayakan anak, mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa termasuk orang tuanya; mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial dan seksual; mereka juga sering terpaksa harus menjadi pengguna dan pengedar Narkoba atau terlibat kejahatan.

1. **Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Anak Jalanan**

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang anak menjadi anak jalanan dan sementara ini banyak orang mengira bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalanan untuk bekerja dan hidup di jalan adalah karena faktor kemiskinan. Namun data literatur yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak turun ke jalan.

Depsos (Astutik, 2004: 23) mengemukakan secara umum ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan:

1. Tingkat Mikro (*intermediate causes),* yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya
2. Tingkat Messo *(underlying causes),* yaitu faktor yang ada di masyarakat
3. Tingkat Makro *(basic causes),* yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro.

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga bisa berdiri sendiri, yaitu:
2. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putur, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
3. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga/tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis, dan sosial.
4. Pada tingkat messo (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:
5. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat *drop out* dari sekolah.
6. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu
7. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal
8. Pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah:
9. Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan Kota yang mendorong urbanisasi.
10. Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar
11. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antara kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai *trouble maker* atau pembuat masalah (*security approach/*pendekatan keamanan).

BKSN (2000) juga menegaskan dengan kata lain faktor-faktor yang membuat keluarga dan anaknya terpisah adalah faktor pendorong dan penarik. Dan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong
2. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka anak-anak disuruh ataupun dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut.
3. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal dirumah/anak lari dari keluarga.
4. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak lari dari rumah.
5. Kesulitan hidup di kampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.
6. Faktor penarik
7. Kehidupan jalanan yang menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas
8. Diajak teman
9. Adanya peluang disektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, lingkungan komunitas juga sebagai penyebab bagi gejala anak di jalanan terutama yang erat kaitannya dengan fungsi stabilitas sosial dari komunitas itu sendiri. Ada dua fungsi utama stabilitas komunitas, yaitu pemeliharaan tata nilai dan pendistribusian kesejahteraan dalam kalangan komunitas yang bersangkutan. Dalam pemeliharaan tata nilai misalnya tetangga atau tokoh masyarakat tidak menasehati manajer, ataupun melarang anak berkeliaran di jalan. Dan berkenaan dengan pendistribusian, kurangnya bantuan dari tetangga atau organisasi sosial kemasyarakatan terhadap keluarga miskin di lingkungannya. Dengan kata lain belum memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar di lingkungan komunitasnya.

Lebih jauh lagi disebutkan, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi anak turun ke jalan, yaitu: (1) Meningkatnya gejala masalah keluarga, (2) Penggusuran dan pengusiran keluarga, (3) Migrasi desa ke kota dalam mencari keluarga, (4) Melemahnya keluarga besar, (5) Adanya kesenjangan sistem jaringan pengaman sosial, (6) Pembangunan yang telah mengorbankan ruang bermain bagi anak, (7) Meningkatnya angka anak putus sekolah, dan (8) Kesenjangan komunikasi.

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya gejala masalah keluarga, seperti
2. Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Perceraian
5. Kawin muda
6. Kekerasan dalam rumah tangga
7. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan demi pembangunan, mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang.
8. Migrasi desa ke kota dalam mencari kerja, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, kemudian transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka terlempar ke jalanan
9. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
10. Adanya kesenjangan sistem jaringan pengaman sosial sehingga jaringan pengaman sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan.
11. Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang bermain dan bekerja.
12. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang.
13. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak telah menyebabkan anak mencari kebebasan.

Dari uraian di atas, beberapa faktor yang saling tarik menarik munculnya gejala anak jalanan dan semakin berkembang yang kuantitaf jumlah anak jalanan semakin sulit diprediksi.

Keberadaan anak-anak jalanan tersebut sudah dalam suatu format untuk mencari penghidupan di jalanan sehingga mereka mempunyai anggapan bahwa uang akan dengan mudah mereka dapatkan di jalanan. Dapat dipahami bahwa sifat kehadiran dan keberadaan mereka di jalan sangat tidak terpola yang diikuti oleh terbentuknya profesi-profesi liar yang dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif.

Sampai saat ini belum adanya program yang terarah dan konkret dalam menanggulangi masalah anak jalanan ini sehingga menimbulkan ikatan secara psikografis antara anak-anak jalanan dengan jalan raya, sehingga tidak mudah untuk memisahkan begitu saja ikatan tersebut.

Dan dapat dirasakan bahwa belum terbentuknya *“good will”* dari semua unsur untuk mengatasi permasalahan pada tingkat yang lebih *riil*. Artinya dalam menanggulangi persoalan anak-anak jalanan harus ada kemauan yang kuat dari semua pihak dan masyarakat luas, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

1. **Pembinaan Anak Jalanan**

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak  bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara.

Mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak. Tetapi lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat, menjadi objek pemerasan berbagai pihak, sesama teman, preman, atau oknum aparat, sasaran eksploitasi, korban pemerkosaan, dan segala bentuk penindasan lainnya.

Upaya menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada anak-anak jalanan dapat memberikan hasil yang lebih baik, tak lepas yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan, dan kemudian merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus pembagian kerja yang lebih terkoordinasi.

Telah dipahami sebelumnya bahwasanya anak jalanan merupakan masalah sosial yang hingga saat ini belum maksimal penanganannya, karena masalah sosial yang satu ini merupakan kondisi yang dirasakan banyak orang, dinilai tidak menyenangkan, kondisi yang juga menuntut pemecahan dan pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial. Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penanganan masalah harus dimulai dengan perumusan masalah sosial.

Suharto (2010: 85) menyatakan,

Dalam praktek penanganan sosial, penanganan kerap diimplementasikan ke dalam program- program kegiatan dari, bagi dan bersama individu, keluarga, kelompok sosial, organisasi sosial dalam mencapai tujuan sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masalah sosial memerlukan aksi sosial dalam penangananya, yang dimana dalam menggapai aksi sosial tersebut tentunya dibutuhkan perencanaan-perencanan sosial sehingga dalam perencanaan tersebut dapat menggambarkan seperti apa yang hendak dilaksanakan dan pertimbangan-pertimbangan apa yang dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial tersebut.

Dalam memberdayakan masyarakat seringkali melibatkan perencanaaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Membangun dan memberdayakan masayarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.

Upaya penanganan anak jalanan merupakan salah satu upaya memberdayakan masyarakat yang dimana dalam upaya tersebut melibatkan penyusunan program dan aksi sosial atau pelaksanaannya. Untuk menangani permasalahan anak jalanan hingga ke akar-akarnya, yang dibutuhkan bukanlah program bantuan yang sifatnya karitatif atau paket-paket program yang di*dropping* begitu saja dari pusat, melainkan program yang benar-benar dikaji secara mendalam dalam upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

Suyanto (2010) menyatakan “Bahwa cara memperlakukan anak-anak jalanan sebagai objek amal, memberikan santunan dan bantuan yang sifatnya temporer niscaya hanya akan melahirkan ketergantungan dari anak jalanan terhadap belas kasihan para pemberi/penderma, dan bahkan mustahil akan hanya meniadakan keberdayaan dan tekad *self help* anak-anak jalanan itu sendiri, dan itu dapat dilihat dari keberadaan anak jalanan yang kian hari kian bertambah karena ketergantungan dengan pemberian yang diberikan oleh masyarakat di jalanan”.

Suharto (2010: 78) menjelaskankan bahwa,

Program dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan, dan penyusunan program dalam proses perencanaan sosial mencakup keputusan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

Terkait dengan pernyataan di atas, dalam proses perencanaan sosial sosial, para perencana dan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan selayaknya bersama-sama menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif. Suatu rencana biasasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dan pragmatis di mana bentuk-bentuk kegiatan dijadwalkan dengan jelas.

1. **Gambaran Program Pembinaan**

Dalam penyusunan program pembinaan tentunya diharapkan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait dapat merumuskan program yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu sebagai pendahuluan dapat dilihat berupa gambaran tentang program itu sendiri yang dimana gambaran dari program pembinaan dapat mencakup dari identifikasi masalah dan penentuan tujuan program tersebut.

1. **Jenis Program Pembinaan Anak Jalanan**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi timbulnya anak jalanan di kota Makassar adalah melalui, (1) Pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, (2) Eksploitasi, (3) Pemberdayaan, (4) Bimbingan lanjutan, dan (5) Partisipasi masyarakat

Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk menangani permasalahan anak jalanan di kota Makassar dengan melakukan tiga langkah pembinaan, yaitu pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial. Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, dan pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitikberatkan kepada peminimalisiran jumlah anak-anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di tempat-tempat umum. Pembinaan Lanjutan juga lebih mengarah kepada masa depan anak jalanan tersebut. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya, dan sebagaimana telah terjaring sebelumnya, anak-anak tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehablitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti rehabilitasi tersebut.
2. Berbicara tentang eksploitasi sendiri sudah ada larangan atau pasal maupun sanksi yang menyebutkan pelarangan dilakukan eksploitasi bagi anak-anak jalanan. Tindak lanjut untuk pelaku eksploitasi sendiri yaitu bagi keluarga anak-anak jalanan yang melakukan eksploitasi akan dikenakan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sedangkan bagi orang lain yang mengatas namakan lembaga atau panti sosial lainnya akan dilakukan pola pengendalian berupa proses hukum sebagaimana ketentuan dalam perundangan-undangan berlaku. Eksploitasi tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 merupakan bentuk pembinaan anak jalanan. Maksud dari eksploitasi disini yaitu, mengurangi atau meminimalisir dan menindak lanjuti pelaku-pelaku ekslpoitasi di kalangan anak-anak jalanan..
3. Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah program pemberdayaan kepada orang tua anak jalanan. Keluarga yang dimaksud disini yaitu keluarga kandung, atau saudara, kakek dan nenek dan/atau walinya. Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan. Pemberdayaan seperti halnya dengan usaha rehabilitasi sosial, yaitu usaha untuk memberdayakan anak jalanan dan keluarga anak jalanan. Dengan memberikan keterampilan, dibina, lalu diberi bantuan modal. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti pekerja sosial professional, anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan.
4. Bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut adalah upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, anak-anak jalan yang berusia kategori produktif, balita, usia sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparatur langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri.
5. Efektivitas partisipasi pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang bersifat relatif. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana pembinaan anak jalanan ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan juga usaha rehabilitasi terhadap anak jalanan. Pembinaan berupa partisipasi masyarakat ini tidak hanya dilakukan orang-orang tertentu atau hanya yang mempunyai jabatan saja. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dalam membina atau mencegah banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Makassar, salah satunya yaitu tidak membiasakan berikan mereka uang di jalanan.

Dari berbagai bentuk program pembinaan yang diuraikan, tidak berarti satu program yang ada lebih baik dari program lain. Pendekatan mana yang dipilih dan lebih tepat, akan banyak ditentukan oleh kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi anak jalanan. Hanya satu sal yang penting diketahui yaitu, pendekatan apapun yang dipilih, secara keseluruhan modal awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap perhatian dan komitmen yang benar-benar tulus dari semua elemen.

1. **Pertimbangan dalam Merumuskan Program**

Dalam merumuskan program tentunya ada pertimbangan-pertimbangan apakah program yang direncanakan dan disusun hingga sedemikian rupa mampu untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Suharto (2010: 78) menyebutkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program, yaitu:

1. Identifikasi program alternatif
2. Penentuan hasil program
3. Penentuan biaya
4. Kriteria pemilihan program

Terkait hal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan program diatas dapat dipahami bahwa proses perumusan program juga tidak dapat lepas dari proses identifikasi masalah yang dimana identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan kebutuhan, dan identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan teknik-teknik dan indikator yang tepat.

1. **Pelaksanaan Program**

Tahap pelaksanaan atau implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan. Penerapan kebijakan atau pemberi pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

Suharto (2010: 79) mengemukakan, ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu “Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana”.

Pelaksanaan program adalah proses dari langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan program. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program merupakan implementasi dari aksi sosial yang prakteknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam penanganan masalah soial.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam pelaksanaan program tentunya akan ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Keberhasilan dari terlaksananya suatu program tentunya membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya pelaksana program, sasaran program tetapi juga lingkungan dari pelaksanaan program tersebut.

Dari berbagai model penanganan anak jalanan yang telah diuraikan tersebut di atas bahwasanya diketahui berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, organisasi profesi, dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka. Namun selalu muncul dibenak kita bahwa dengan berbagai model penanganan anak jalanan yang telah dilakukan ini mengapa jumlah anak jalanan di Kota Makassar tidak juga kunjung berkurang. Mungkinkah hal ini tidak menjadi perhatian khusus dalam pengkajiannya oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar.

Kalau diperinci satu per satu barang kali ada puluhan atau bahkan ratusan masalah yang dihadapi anak-anak yang hidup di jalanan yang perlu mendapat pengkajian khusus dan mendalam dalam upaya penyelesaiannya. Namun paling tidak ada delapan masalah prioritas anak jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak.

Menurut Suyanto (2013: 217) kedelapan masalah tersebut adalah:

1. Gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri
2. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang acap kali kelewat batas bagi anak-anak yang masih sangat belia
3. Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang rekatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai
4. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua yang telatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
5. Adanya bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar terhadap anak jalanan
6. Adanya kekeliruan persepsi dan sikap *prejudice* sebagian warga masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan
7. Adanya sebagian anak jalanan yang tengah menghadapi masalah khusus, baik akibat ulah yang terencana maupun tidak
8. Mekanisme koordinasi dan system kelembagaan penanganan anak jalanan yang belum berkembang secara mantap, antara pemerintah dengan LSM maupun persoalan intern di antara lembaga itu sendiri

Sudah tentu, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan anak jalanan tersebut di atas. Namun ada hal yang seyogyanya dipahami sebelum melakukan langkah intervensi di lapangan. Modal yang dibutuhkan untuk melakukan program intervensi apa pun adalah sikap empati dan kesediaan untuk menghilangkan sikap *predujice* terhadap anak jalanan yang sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan. Dan tentunya tidak lepas dari pemahaman tentang faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program itu sendiri. Sebagai manusia anak jalanan adalah anak-anak yang berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar, sehingga sudah sewajarnya jika mereka diberi kesempatan seluasnya untuk menampilkan eksistensi dirinya sebagai bagian dari keinginannya untuk beraktualisasi.

1. **Kerangka Pikir**

Anak jalanan merupakan fenomena perkotaan yang kompleks dan terus meningkat kuantitas dan kualitasnya. Fenomena permasalahan tersebut disebabkan berbagai faktor terkait seperti kemiskinan, keluarga, bahkan msyarakat itu sendiri. Merebaknya anak jalanan juga diakibatkan oleh kegagalan sistem pendidikan yang cenderung kapitalislik, tidak banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan marjinal. Memang, kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar. Anak jalanan merupakan fenomena kota besar di mana semakin cepat perkembangan sebuah kota semakin cepat pula peningkatan jumlah anak jalanan.

Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan melainkan juga karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering dilanggar.

Anak jalanan yang kodratnya seharusnya masih berada di sekolah, namun realita menjawab sebaliknya bahwa mereka telah menjalani kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini kemudian tidak dapat mengakses pendidikan baik pendidikan informal atau pendidikan keluarga, pendidikan formal, dan bahkan kemungkinan juga sulit untuk pendidikan nonformal., hal ini karena mereka tidak memiliki waktu untuk memikirkannya atau bahkan menjalaninya.

Telah banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi merebaknya anak jalanan di Kota Makassar yang keberadaannya sering menimbulkan keresahan di masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esah, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam menangani anak jalanan yang kuantitasnya semakin meningkat. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, di Kota Makassar diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Berbagai program yang dilaksanakan pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas sosial dalam menangani masalah anak jalanan, namun realita anak jalanan dari tahun ke tahun kuantitasnya semakin meningkat.

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi acuan atau bahkan pertimbangan Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan sehingga masalah sosial ini dapat teratasi. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti bagaimana sebenarnya model pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini perealisasian Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui skema seperti berikut:

Gambaran Program Pembinaan

Jenis Program yang Dilaksanakan

Penyusunan Program Pembinaan

Model Pembinaan Anak Jalanan

Pertimbangan dalam merumuskan Program

Pembinaan Anak Jalanan

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Pembinaan

Faktor Pendukung dan Penghambat

**Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir**